

## tajuk

# Waspadai Bencana Banjir

Musim hujan sudah tiba. Bencana banjir mulai terjadi di mana-mana. Di Kota Padang, Sumatra Barat, banjir bandang yang terjadi kemarin mengakibatkan sedikitnya 600 rumah terendam air. Banjir dilaporkan merendam Kecamatan Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, Bungus Teluk Kabung, Padang Selatan, Padang Utara, dan Pauh.

Banjir yang terjadi diakibatkan hujan deras di bagian hulu dan hilir sehingga peningkatkan debit sungai pun meluap. Data sementara tercatat dua korban jiwa dalam musibah tersebut. Banjir juga menyebabkan satu unit jembatan hanyut dan dua jembatan putus.

Akhir Oktober lalu, banjir juga melanda sejumlah wilayah di Riau. Akibatnya, ribuan rumah warga di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Riau terendam air. Banjir di Kabupaten Rohil ini melanda dua kecamatan, yakni di Pekaitan dan terbaru berada di Bangko.

Dari dua kecamatan itu, ada delapan kepenghuluan (desa) yang terkena banjir. Kedalaman banjir bervariasi dari 20 sentimeter hingga satu meter.

Selain di Sumatra Barat dan Riau, Oktober lalu banjir juga melanda Aceh dan Sumatra Utara. Korban sudah berjatuhan dan kerugian pun tidak sedikit.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebelumnya sudah meminta masyarakat untuk mewaspadai peningkatan hujan di sebagian wilayah Indonesia. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, musim hujan di Indonesia terjadi mulai Oktober-November 2018. Sementara itu, puncak musim hujan akan terjadi pada Januari-Februari 2019.

Saat ini puncak musim hujan belum terjadi. Tapi, banjir sudah mulai melanda sejumlah tempat. Inilah yang harus diwaspadai. Jika awal musim penghujan saja sudah terjadi banjir, bagaimana nanti jika curah hujan mencapai puncaknya? Curah hujan yang tinggi tak hanya berakibat banjir, tapi juga tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang, dan jalan licin.

Selagi curah hujan belum terlalu tinggi sebaiknya persiapan menghadapi banjir dilakukan dari saat ini. Wilayah yang menjadi daerah langganan banjir selayaknya menyiapkan warganya untuk mengantisipasi datangnya banjir.

Jakarta, misalnya. Hampir bisa dipastikan bahwa setiap tahun Ibu Kota dilanda banjir. Yang membedakan setiap tahun hanya skalanya, banjir besar atau biasa-biasa saja. Banjir kerap terjadi pada akhir tahun atau awal tahun.

Warga dan Pemerintah Provinsi Jakarta sering kali tidak siap untuk menghadapi banjir. Padahal, ada cukup waktu sepanjang tahun untuk mempersiapkannya.

Untuk kasus Jakarta, soal air kiriman Bogor melalui Sungai Ciliwung yang luar biasa besar, sumur pompa yang *ngadat*, dan drainase yang mampat, sering dituding menjadi penyebab banjir. Tapi, masalah itu kembali berulang setiap tahun, seperti halnya banjir yang datang berulang.

Saat banjir sudah melanda, semua sibuk membahas bagaimana mengantisipasinya pada masa mendatang. Namun, setelah banjir berlalu, diskusi-diskusi itu juga berlalu. Semuanya kembali seperti semula, seolah-olah banjir tak akan pernah lagi menerpa.

Melihat kejadian di sejumlah daerah yang dilanda banjir, agaknya kita perlu meningkatkan kewaspadaan. Masih cukup waktu menyiapkan diri sebelum puncak hujan benar-benar datang pada Januari-Februari nanti.

Jangan sampai tak melakukan apa-apa untuk menghadapi banjir yang hampir pasti akan terjadi. ■

## suarapublika

### Menghargai Pengajar

Berturut-turut, aksi demo guru honorer berlangsung di berbagai daerah. Puncaknya, ribuan guru yang berasal dari berbagai daerah tersebut tumpah ruah di depan Istana Negara pada Selasa, 30 Oktober 2018.

Bahkan, para ‘Oemar Bakri’ ini rela bermalam demi tercapainya tuntutan. Tidak neko-neko, para pencerdas generasi ini hanya inginkan kelayakan upah sehingga dapat tercukupi kebutuhan hidup yang kian hari semakin tinggi.

Dalam konteks kekinian, menjadi pegawai negeri adalah jalan yang mereka rasa paling realistis untuk menggapai asa. Wajar, jika mereka pun memperjuangkannya. Miris sebenarnya, menyaksikan para pahlawan bangsa yang tidak dihargai seperti ini.

Mereka mendedikasikan diri, ilmu, dan waktu demi generasi penerus. Namun, jerih payah yang tercurah, tiada berbalas dengan upah yang manusiawi.

Sesungguhnya, bukan mustahil kesejahteraan para guru dapat dijamin tanpa harus membedakan kasta, ASN, atau guru biasa. Karena hakikatnya, tugas mereka adalah sama, mendidik generasi untuk masa depan bangsa.

Mari belajar pada peradaban agung yang pernah ada. Di mana para guru dijamin kesejahteraan. Tercatat indah dalam tinta sejarah, pada masa kepemimpinan Umar bin Khatab.

Tidak kurang dari 15 dinar atau setara dengan 63,75 gram emas setiap bulannya, upah yang diterima oleh para guru. Tanpa ada kasta. Setiap pengajar memperoleh harga yang layak. Semoga, negeri ini dapat segera berbenah.

Bersedia menoleh pada sejarah peradaban dunia dan mempelajarinya. Mengadopsi apa saja yang terbukti menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya.

**Wulan Citra Dewi,** Pekanbaru, Riau

# Kebijakan Pangan

- UJANG PAMAN ISMAIL** Dekan Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau

Banyak pihak berharap, rilis penyempurnaan metode perhitungan data produksi beras nasional oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla, 22 Oktober lalu, mengurai benang kusut persoalan data beras nasional.

Bersamaan itu, sayangnya, ada pihak yang menjadikannya ‘alat’ untuk menggiring wacana mengenai perlukah pemerintah kembali mengimpor beras atau tidak.

Seperti kita ketahui, metode kerangka sampel area (KSA) yang digunakan mempre-diksi data produksi beras oleh BPS, diyakini lebih unggul untuk memperoleh data dibandingkan metode lama. Sebab, dilakukan melalui serangkaian uji coba dengan teknologi mutakhir.

Keterlibatan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ART), Badan Informasi Geospasial, serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sangat diapresiasi.

BPS menguji coba metode KSA sejak 2015 dan diaplikasikan di seluruh Indonesia sampai level kecamatan pada 2018. Namun, publik bertanya-tanya, mengapa BPS tidak melibatkan kementerian dan lembaga teknis terkait, seperti Kementerian dan Bulog?

Saat melakukan tahapan uji coba, sebelum merilis data beras yang baru, BPS kerap menyampaikan KSA merupakan kumpulan sampel area pengamatan (segmen) dalam suatu wilayah administrasi yang mewakili populasi sawah.

Pengamatan dilakukan terhadap sampel sawah (lahan) untuk mengetahui fase pertumbuhan dan menghitung perkiraan luas panen padi. Pengamatan dilakukan setiap tujuh hari terakhir setiap bulan terhadap setiap titik amatan di dalam segmen dengan mendasarkan peta citra dan menggunakan aplikasi berbasis Android.

BPS mengemukakan, lewat metode ini kesalahan yang disebabkan kemungkinan petugas merekayasa hasil amatan dapat diminimalisasi. Dari hasil pengamatan, setiap bulan dapat diperoleh perhitungan luas tanam padi dan luas panen padi periode tertentu.

# Pelajaran dari Polemik SKM

- AHMAD SYAFIQ** Ketua Pusat Kajian Gizi dan Kesehatan Universitas Indonesia

Badan Pengawas Obat dan Makanan (B POM) baru saja menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan. Aturan ini adalah revisi Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.

Dengan terbitnya Perka BPOM ini, Surat Edaran Nomor HK.06.5-51.511.05.18.2000 tahun 2018 tentang Label dan Iklan pada Produk Susu Kental dan Analognya yang dikeluarkan 22 Mei 2018 tidak berlaku.

Langkah BPOM menerbitkan peraturan tentang label pangan olahan patut diapresiasi. BPOM telah berupaya mengakomodasi berbagai masukan yang berasal dari konsumen, produsen, asosiasi, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi.

Hal ini dapat terlihat dari beberapa penegasan yang terdapat dalam aturan yang diundangkan sejak 19 Oktober 2018 tersebut.

Sebagai contoh, khusus label susu kental manis (SKM) BPOM mewajibkan produsen mencantumkan keterangan, “Perhatikan: Tidak untuk menggantikan air susu ibu, tidak cocok untuk bayi sampai usia 12 bulan, dan tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya sumber gizi.”

Tiga ketentuan tersebut semakin mempertegas label yang diatur dalam aturan sebelumnya yang hanya menyatakan susu kental manis, “Tidak cocok untuk bayi sampai usia 12 bulan”. Penegasan ini diharapkan mempus pro-kontra yang selama ini muncul.

Secara aturan, pro-kontra susu kental manis sesungguhnya sudah selesai. BPOM tinggal mengawasi dan memberi tindakan tegas terhadap produsen yang tidak menaati peraturan baru. Dalam waktu 30 bulan ke depan, produsen harus menyesuaikan labelnya dengan ketentuan label yang baru.

Meski demikian, jika menurut sejumlah peristiwa yang terjadi selama lebih dari satu tahun terakhir, masih ada pekerjaan besar bagi pemerintah, produsen, dan masyarakat

Produktivitas padi diukur dengan pengamatan terhadap hasil panen gabah kering panen (GKP) melalui observasi ubinan. Ubinan dilengkapi peralatan yang terukur keakuratannya sehingga bisa diperkirakan produktivitas GKP per hektare.

Misalnya, hasil panen GKP rata-rata 3,5 kg, berarti produktivitas sawah 5,6 ton GKP per hektare. GKP dikonversi ke gabah kering giling (GKG) dan padi berdasarkan perhitungan survei sendiri yang disebut survei konversi gabah ke beras.

Dengan perhitungan tersebut, yang menurut BPS telah dievaluasi dan diuji secara menyeluruh selama tiga tahun, diperoleh hasil pengamatan dan perhitungan angka produksi 32,4 juta ton hingga akhir 2018.

Dengan melihat konsumsi beras melalui survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), jumlah konsumsi beras 29,6 juta ton. Jadi, dalam hasil perhitungan tersebut Indonesia mengalami surplus beras 2,85 juta ton.

Dengan diperolehnya data produksi beras hasil metode BPS ini, masyarakat pantas lega karena ternyata negeri kita surplus beras 2,85 juta ton pada 2018. Namun, hasil perolehan data BPS juga masih banyak dipertanyakan.

Misalnya, pengamat ekonomi Suropati Syndicate, Muhammad Ardiansyah Laitte, yang menekankan data beras terbaru hasil metode KSA sesungguhnya baru pada tahap rilis secara nasional. Data itu belum menghitung angka per kecamatan dan kabupaten.

Kehadiran data perinci sebagai alat untuk memantau fakta lapangan sangat ditunggu, juga perlunya segera dihitung angka mundur hingga 10 atau 20 tahun terakhir dan disebarkan ke publik dan lembaga dunia.

Ardiansyah mempertanyakan beberapa hal yang menjadi catatan luas panen, yakni bila menggunakan data luas baku sawah 7,1 juta hektare, lantas bagaimana nasib fakta petani tanam padi di luar luas baku sawah, tidak dihitung. (Muhammad Ardiansyah Laitte, Nusakini, 26 Oktober 2018).

Mengenai menghitung mundur data, Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanian Kementerian I Ketut Kariyasa (26/10/2018) menyampaikan, BPS perlu segera melakukan *backcasting* data, baik untuk data luas panen maupun produksi padi.

*Backcasting* dimaksudkan untuk mengoreksi data produksi luas panen dan padi/beras tahun sebelumnya dengan menggunakan pendekatan masa, yakni metode KSA.

Dengan kata lain, melakukan peramalan mundur dengan menggunakan hasil metode KSA tahun 2018 sebagai basis peramalan pada tahun sebelumnya. Ia menilai, ini penting agar semua data dari dulu sampai sekarang bisa digunakan untuk analisis selanjutnya.

untuk menciptakan konsumen yang cerdas.

Sebab, bagaimanapun ketatnya sebuah aturan, keputusan akhir mengonsumsi produk akan kembali kepada konsumen. Yang jelas, setidaknya ada tiga pelajaran yang dapat kita petik dari polemik susu kental manis.

Pertama, kreativitas suatu label atau iklan sebuah produk pangan tidak boleh mengaburkan esensi dari kandungan dan kegunaan produk itu sendiri.

Sebuah label atau iklan produk pangan yang merupakan hasil kreatif sering kali memunculkan mispersepsi (mengaburkan informasi yang sesungguhnya) bagi mereka yang menyaksikan atau merasakannya.

Visualisasi baik pada label maupun iklan, tidak boleh memunculkan persepsi bahwa produk tersebut adalah satu-satunya sumber gizi yang bisa memenuhi semua kebutuhan tubuh manusia.

Baigaimanapun, sebagai sebuah produk kreatif yang bertujuan mendorong peningkatan pemasaran, label atau iklan memiliki kewajiban moral dalam mengendalikn lahirmya perbedaan persepsi dan interpretasi oleh konsumen.

Kedua, peningkatan literasi gizi masyarakat. Polemik mengenai sebuah produk pangan sering kali muncul akibat rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang, terutama bagi anak-anak mereka.

Literasi gizi terdiri atas beberapa tingkatan mulai dari literasi fungsional, interaktif, sampai literasi kritisal (Bari, 2012). Jika literasi fungsional mencerminkan pemahaman terhadap gizi, literasi interaktif dan kritisal merupakan cerminan dari perilaku gizi.

Tingkatan literasi gizi dapat dijadiakn acuan (*benchmark*) data gizi dan kesehatan masyarakat sebagai penanda perilaku gizi untuk melengkapi dan menguatkan data-data antropometri dan asupan gizi.

Masyarakat acapkali terombang-ambing opini tidak berdasar yang berkembang di media ataupun media sosial. Karena itu, berbagai kampanye yang dilakukan secara konsisten untuk meningkatkan pemahaman tentang gizi seimbang multak diperlukan.

Pemerintah, industri, dan masyarakat harus bersama-sama mendorong berbagai program promotif dan preventif untuk mening-

Misalnya, untuk melihat kinerja perkembangan dan analisis produksi padi dari tahun ke tahun, menurut Kariyasa, tanpa melakukan *backcasting* data, akan tidak relevan karena hasil analisisnya akan tidak tepat menggambarkan kondisi riil di lapangan.

Selain itu, menurut dia, akan menimbulkan pertanyaan bagi banyak orang, terutama yang belum paham mengapa terjadi perbedaan antara luas panen dan produksi padi pada 2018 dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain itu, yang perlu diperhatikan, lanjut Kariyasa, bagaimana dengan informasi yang sudah dipublikasikan.

Sebagai contoh, enam bulan lalu dalam Rice Market Monitor (Volume XXI ISSUE Nomor 1, April 2018) FAO mengestimasi produksi padi di Indonesia tahun 2017 sekitar 73,9 ton GKG dan pada 2018 mencapai 74,5 juta ton GKG. Sementara hasil perhitungan metode KSA BPS, produksi padi 2018 hanya 56,54 juta ton GKG.

Namun, menurut Kariyasa, Kementan menyambut baik upaya memperbaiki akurasi data luas panen dan produksi. Tapi ironisnya, muncul kesan data produksi beras nasional yang surplus ini dijadikan ‘alat’ politik untuk membangun opini, bila pemerintah harus kembali mengimpor beras.

Alasan yang dipakai cukup aneh dengan mengatakan langkah impor beras dinilai sudah tepat karena kondisi di lapangan saat ini adalah distribusi beras tidak merata (Dwi Ardian, *Kompas*, 29 Oktober 2018).

Padahal, Budi Waseso, dirut Bulog, pada 26 Oktober, menegaskan Indonesia tak perlu impor beras. Sebab, stok yang ada dipastikan cukup hingga akhir 2018. Bahkan, diprediksi hingga Juni 2019, ketersediaan beras Bulog masih sangat memadai.

Dalam bersengkarat persoalan pangan, memang begitu terus adanya tarik-menarik politik dan pertarungan penganut mazhab ekonomi liberal dan ekonomi kerakyatan. Diperkeruh pula oleh masih banyaknya mafia pangan dan tentakelnya di pemerintahan yang terus mengintervensi kebijakan pangan.

Setelah data pangan dari BPS keluar dan dinyatakan Indonesia mengalami surplus, berbagai alasan kembali disodorkan untuk membenarkan kebijakan impor beras. Padahal, sejak pemerintahan kabinet kerja Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla terbentuk pada 2014, garis besar arah pembangunan nasional adalah kemandirian. Perlahan harapan itu mulai terwujud di sektor pangan.

Ini terlihat dengan berhasilnya Indonesia secara cepat melakukan lompatan dalam meningkatkan produksi. Yang jadi persoalan saat ini adalah mentalitas para pengambil kebijakan. ■

katkan tingkat pemahaman masyarakat tentang gizi dan pencegahan malnutrisi.

Peningkatan status kesehatan gizi ibu dan anak sebagai salah satu sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional di bidang kesehatan patut didukung penuh.

Berbagai program *corporate social responsibility* (CSR) mengenai edukasi gizi dan kesehatan masyarakat yang digagas berbagai perusahaan harus diperkuat.

Dengan demikian, proses literasi gizi dan kesehatan masyarakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien tanpa harus terlalu bergantung pada kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ketiga, penguatan data gizi dan kesehatan masyarakat sebagai dasar penentuan strategi dan kebijakan menyangkut gizi dan kesehatan masyarakat yang tepat.

Polemik susu kental manis telah memberikan pelajaran sangat berharga betapa sebagian pihak secara serampangan menghubungkan produk ini dengan berbagai penyakit malnutrisi, seperti diabetes, obesitas, bahkan *stunting*.

Padahal, belum ada satu pun data dan fakta ilmiah yang menunjukkan tentang hal ini. Apalagi, malnutrisi adalah sebuah situasi yang diakibatkan banyak faktor saling terkait, seperti asupan makanan dan minuman, sanitasi, gaya hidup, dan lainnya.

Walhasil, sebuah penyakit yang diidp seseorang bisa jadi diakibatkan oleh faktor yang berbeda. Karena itu, keterlibatan pakar, akademisi, dan komunitas yang fokus dan peduli terhadap gizi dan kesehatan sangat diperlukan agar kita tak mudah menjadikan sebuah produk sebagai kambing hitam.

Data dan fakta yang kuat serta mutakhir akan sangat berharga dalam mendorong perbaikan gizi dan kesehatan masyarakat. Tentu kita berharap polemik susu kental manis akan menjadi yang terakhir kali terjadi.

Produsen akan senantiasa sadar menjaga etika kreativitasnya, pemerintah dan industri terus mendorong literasi gizi, serta pakar dan akademisi memperkuat data dan fakta.

Jika ini pararel dilakukan, masyarakat akan jauh lebih cerdas, sehingga tak mudah terlibat dalam polemik produk pangan, meski ada pihak yang mencoba memantiknya. ■

## REPUBLIKA

Terbit sejak 4 Januari 1993, Republika hadir sebagai pelopor pembaruan media massa Indonesia. Harian ini memberi warna baru pada desain, gaya penugaraan, dan sudut pandang surat kabar negeri ini. Sebagai koran, kemudian portal berita pertama di Tanah Air, media ini melahirkan keseimbangan baru dalam tata informasi. Republika terbit demi kemaslahatan bangsa, penebar manfaat untuk semesta.

<b>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:</b> Irfan Junaldi
<b>Wakil Pemimpin Redaksi:</b> Nur Hasan Murtaji
<b>Redaktur Pelaksana Koran:</b> Subroto
<b>Redaktur Pelaksana Newsroom:</b> Maman Sudirman
<b>Redaktur Pelaksana Online:</b> Elba Damhuri
<b>Redaktur Khusus:</b> Ikhwanal Kiram Mashuri
<b>Redaktur Senior:</b> Agung P Wazta
<b>Wakil Redaktur Pelaksana:</b> Frikah Fansuri, Heri Ruslan, Kumara Dewatarsi, Joko Sadewo
<b>Asisten Redaktur Pelaksana:</b> Priyantono Oemar, Stevy Maradona, Ferry Kisihandi, Mansyur Faqih, Didi Purwadi, Muhammad Subarkah, Budi Raharjo, Edwin Dwi Purianto
<b>Sekretaris Redaksi:</b> Hamidah Sagaf
<b>Perwakilan Jawa Barat:</b> Rachmat Santosa Basarah (Kepala Perwakilan) Irfan Fitrat Pribadi (Kepala Redaksi)
<b>Perwakilan DIY - Jateng &amp; Jatim:</b> Haryadi B Susanto (Kepala Perwakilan) Yusuf Assidiq (Kepala Redaksi)

Semua naskah yang dikirim ke Redaksi dan diterbitkan menjadi milik Harian Republika. Semua wartawan Harian Republika dibekali tanda pengenalan dan tidak menerima maupun meminta imbalan dari siapa pun. Semua isi artikel/tulisan yang berasal dari luar, sepenuhnya tanggung jawab penulis yang bersangkutan. Semua isi artikel/tulisan yang terdapat di supplements daerah, menjadi tanggung jawab Kepala Perwakilan Daerah bersangkutan.

MAHAKA GROUP

**Wartawan Senior:** Harun Husein, Nurul S Hamami, Selamat Ginting, Sivi Tri Puji Budiwijayati, Rakhmat Hadi Supicto.

**Kepala Desain:** Sarjono. **Kepala Infografis:** Muhammad Ali Imron. **Kepala Penyunting Bahasa:** Rinin Liechtiana. **Kepala Digital:** Desi Purwo Wijianto

**Star Redaksi:** Alwi Shahab, Syahrudin El-Fikri, Andi Nur Aminah, Andri Saubani, Agus Yulianto, Dewi Mardiani, Endro Yuwanto, Fitriyan Zamzami, Indira Rezkisari, Irwan Kelana, Israr, Khoiril Azwar, Nashih Nashrullah, Natalia Endah Hapsari, Nidia Zuraya, Nina Chairani Ibrahim, Ratna Puspita, Reiny Dwinanda, R Hiru Muhammad, Teguh Firmansyah, Wachidah Handasah, Yeyen Rostiyani, Yogi Arndi Cahyadi, Abdullah Sammy, Agus Raharjo, Amri Amrullah, Ani Nursalikah, A Syalaby Ichsan, Bilal Ramadhani, Bowo Pribadi, Citra Listya Rini, Darmawan, Desy Susilawati, Djoko Suceno, Dwi Murdaningrini, Eko Widlyanto, Erdy Nasrul, Erik Purnama Putra, Esthi Maharani, Feman Rahadi, Friska Yolandra, Ichsan Emrald Alamsyah, Lilis Sri Handayani, Arie Lukihardianti, Ili Nina Winarsih, Mohammad Akbar, Muhammad Fakhruddin, M Hafli, Neni Ridarini, Nur Anli, Qommarria Rostanti, Rusdy Nurdiansyah, Satya Festiani, Setyanawilitta Lwiakansera, Tahta Adilla, Wilhdan Hidayat, Prayogi, Bambang Noroyono, Gita Amanda Jannikawati, Angga Indrawan, Satria Kartika Yudha, Rizky Jaramaya, Gilang Akbar Pramubadi, Rr Laeny Sulistyawati, Nora Azizah, Lida Puspaningtyas, Dessy Sucati Saputri, Ratna Ajeng Tejomukti, Reja Irfi Widodo, Fuji Pratiwi, Mias Alami Huda, Sadiq Rahman, Agung Sengsango, Haziqiansyah, Yudha Mangala Priana Putra, MI Amin Masdarri, Fian Firmajagi, Kanta Rahrja Ucu, Putri Almas, Rahmat Fajar, Fauziah Mursid, Debbie Susrono, Ni Marsur, Melissa Riska Putri, Umi Nur Fadhilah, M Fauzi Ridwan, Masgill Aries (Palembang), Mutia Ramadhani (Bali), Ahmad Fikri Noor, Eric Iskandarsyah, Kiki Sakinah, Lintang Satria Zulfikar, Eto Supriyadi, Marniati, M Nursyamsi, Nuryo Andika Candra, Binti Sholikah, Christyaningsih, Iit Septyaningsih, Sri Handayani, Dadang Kumria, Adysha Citra R, Andrian Saputra, Dian Fath Risalah, Febrian, Fira Napsyabani, Fujii Eka Permana, Hasanul Rizqa, Intan Pratwi, Retno Wulandhari, Rossi Handayani, Umar Mukhtar, Wilda Fitriyani, Anggoro Pramudya, Santi Sopia, Wisnu Ari Prasetyo, Frederikus Dominggus Bata, Wahyu Suryana, Rizkvan Adhiyuda, Kamran Dikarna, Dian Erik Nugraheng, Zully Istiqomah, Dwina Agustini, Maburroh, Noer Qomariyah Kusumawardhani, Rahayu Subekti, Rizky Suryarandika, Shelli Asrianti, Idealisa Masryfina, Mulyiddin, Ilham Tirta, Rigta Nurul Iman, Edi Yusuf, Arif Satrio Nugroho, Febrianto Adi Saputro, Ronggo Astunggoro, DEA Alif Soraya, Gumanti Awaliyah, Rahma Sulistya, Novita Intan, Fitrianto, Fakhtar Khoiron Lubis.

**Alamat Redaksi:** Jl. Warung Buncit Raya No. 37, Jakarta 12510 T. 021 780 3747 (Hunting), 021 791 84744 (Iklan) F. 021 780 0649, 798 3623 (Redaksi), 021 798 1169 (Iklan), 021 791 98442 (Sirkulasi dan Berlangganan) **Email Redaksi Republika:** sekretariat@republika.co.id. **Percepatan:** PT Republika Media Mandiri Jl. Rawa Bali 2 No. 1 Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta

**Alamat Perwakilan:** Republika Jawa Barat: Jl. Mangga No. 47 Bandung 40114 T. 022.87243363-87243364. F. 022 8724 3365 Republika DIY-Jateng & Jatim: Jl. Perahu No. 4, Kota Baru, Yogyakarta T. 0274. 544972, 566028. F. 0274. 541.582 **Surat Izin Usaha Penerbitan Pers:** SK Menppena, 021.798 1169/1992, **Anggota Serikat Penerbit Surat Kabar:** Anggota SP5 No. 163/1993/11A/2012.

**Harga Berlangganan:** Rp 100.000 per bulan. **Harga Eceran Pulau Jawa** Rp 4.500 per eksemplar. **Harga Eceran Luar Jawa:** Rp 4.500 per eksemplar (tambah ongkos kirim).

**Rekening Bank:** a.n PT Republika Media Mandiri: Bank BSM, Cab. Warung Buncit, No. Rek. 003.011.3448 Bank Mandiri, Cab. Warung Buncit, No. Rek. 127.000.424.0642 Bank Lippo, Cab. Warung Buncit, No. Rek. 727.30.028.988 Bank BCA, Cab. Graha Inti Fauzi, No. Rek. 375.305.6668 Bank BNI Syariah, Cab. Fatmawati, No. Rek. 021.159.324.0